

**STRATEGI POLITIK PENDIDIKAN KEPALA SEKOLAH  
MENENGAH PERTAMA**



**Disusun sebagai salah satu syarat menyelesaikan Program Studi Strata II pada  
Jurusan Magister Administrasi Pendidikan Sekolah Pascasarjana**

**Oleh:**

**ZUMROTIN FIRDAUS**

**Q100190045**

**PROGRAM STUDI MAGISTER ADMINISTRASI PENDIDIKAN  
SEKOLAH PASCASARJANA  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA**

**2022**

**HALAMAN PERSETUJUAN**

**STRATEGI POLITIK PENDIDIKAN KEPALA SEKOLAH  
MENENGAH PERTAMA**

**PUBLIKASI ILMIAH**

Oleh:

**ZUMROTIN FIRDAUS**  
**Q 100 190 045**

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji oleh:

**Dosen Pembimbing**



**Prof. Dr. Budi Murtiyasa, M.Kom.**

**NIK. 19610722**

**HALAMAN PENGESAHAN**

**STRATEGI POLITIK PENDIDIKAN KEPALA SEKOLAH  
MENENGAH PERTAMA**

oleh:

**ZUMROTIN FIRDAUS**  
**Q100190045**

**Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji  
Sekolah Pasca Sarjana  
Universitas Muhammadiyah Surakarta  
Pada hari Rabu, 9 Februari 2022  
dan dinyatakan telah memenuhi syarat**

**Dewan Penguji:**

**1. Prof. Dr. Budi Murtiyasa, M.Kom.**

**(Ketua Dewan Penguji)**

(  )

**2. Dr. Eko Supriyanto, M.H.**

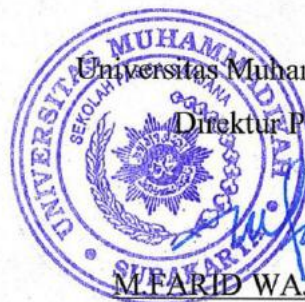
**(Anggota Dewan Penguji I)**

(  )

**3. Dr. Achmad Fathoni, M.Pd.**

**(Anggota Dewan Penguji II)**

(  )



**Universitas Muhammadiyah Surakarta  
Direktur Pasca Sarjana**

**M. FARID WAJDI, MM., PH.D**

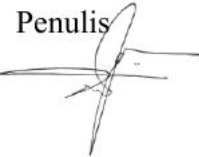
**NIP.494/0605056501**

## PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam publikasi ilmiah ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali secara tertulis diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Apabila kelak terbukti ada ketidakbenaran dalam pernyataan saya di atas, maka akan saya pertanggungjawabkan sepenuhnya.

Surakarta, 26 Februari 2022

Penulis  


**ZUMROTIN FIRDAUS**  
**Q100190045**

# STRATEGI POLITIK PENDIDIKAN KEPALA SEKOLAH MENENGAH PERTAMA

## Abstrak

Kepala sekolah tidak hanya mengelola sekolah dalam makna statis, melainkan menggerakkan semua potensi yang berhubungan langsung atau tidak langsung bagi kepentingan proses pembelajaran siswa. Peran kepala sekolah dalam menciptakan kondisi pembelajaran yang efektif dan efisien akan berdampak pada mutu prestasi dan masa depan peserta didik. Berdasarkan observasi dan wawancara dengan beberapa tenaga pendidik dan kependidikan, didapatkan informasi bahwa taktik politik yang diberlakukan oleh kepala SMP Muhammadiyah di Kota Salatiga sebaiknya dievaluasi untuk terwujudnya sekolah yang lebih baik lagi. Metode penelitian yang digunakan adalah Penelitian ini adalah penelitian evaluasi yang dilaksanakan dengan menggunakan model *discrepancy*. Tujuan evaluasi program dengan model *discrepancy* adalah untuk membantu administrator mengambil sebuah keputusan untuk keberlangsungan program selanjutnya (Dimmitt, 2010, p.45). Penelitian evaluasi program dengan model *discrepancy* ini difokuskan pada tiga aspek yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program. Dalam penelitian evaluasi ini metode yang banyak digunakan adalah peninjauan (*review*) dokumen, dengar pendapat, dan wawancara mendalam. Berdasarkan hasil penelitian dengan menggunakan kriteria efektivitas, didapatkan bahwa metode evaluasi jalannya taktik politik berupa membangun jaringan, mengelola informasi, dan membangun koalisi oleh kepala sekolah menengah pertama Muhammadiyah di Kota Salatiga adalah kepala SMP Muhammadiyah di Kota Salatiga memiliki strategi membangun koalisi sebagai sarana penyamaan persepsi dan penyatuan pemikiran setiap tenaga pendidik untuk bisa merumuskan program sekolah sehingga program yang dijalankan bisa optimal.

**Kata Kunci :** Strategi politik, pendidikan, peran kepala sekolah

## Abstract

The principal does not only manage the school in a static sense, but also mobilizes all the potentials that are directly or indirectly related to the interests of the student learning process. The role of the principal in creating effective and efficient learning conditions will have an impact on the quality of achievement and the future of students. Based on observations and interviews with several educators and education staff, information was obtained that the political tactics applied at SMP Muhammadiyah Plus Salatiga should be evaluated for the realization of a better school. The research method used is this research is an evaluation research conducted using the discrepancy model. The purpose of program evaluation with the discrepancy model is to help administrators make decisions for the continuation of the next program (Dimmitt, 2010, p.45). Program evaluation research with this discrepancy model is focused on three aspects which include planning, implementation, and program evaluation. In this evaluation research, the most widely used methods are document review, hearings, and in-depth interviews. Based on the results of the study using the effectiveness criteria, it was found that the method of evaluating the course of political tactics in the form of building networks, managing information, and building coalitions at SMP Muhammadiyah Plus Salatiga City is that the head of SMP Muhammadiyah Plus Salatiga has a strategy of building coalitions as a means of equalizing perceptions and unifying the thoughts of every employee. educators to be able to formulate school programs so that the programs that are run can be optimal.

**Keywords :** political strategy, education, the role of the principal

## 1. PENDAHULUAN

Hakikat politik sebenarnya adalah kekuasaan (*power*) itu sendiri, Ketika kita berbicara tentang ilmu politik, yang kita maksud adalah ilmu kekuasaan, demikian pendapat Laswel yang dikemukakan oleh Isjwara (1982), kemudian Isjwara juga mengemukakan pendapat Roucek tentang masalah utama politik adalah masalah distribusi dan kontrol kekuasaan. Politik adalah pencarian kekuasaan dan hubungan politik adalah hubungan kekuasaan (Zald, M.M., and Berger, M. A. 1978), aktual atau potensial, jadi kekuasaan (*power*) dalam politik adalah pusat kajian dan bahkan Laswel mengatakan ilmu politik adalah ilmu tentang kekuasaan. Kekuasaan dalam arti yang sempit adalah sebagai kegiatan mobilisasi sumber terutama sumber daya manusia sehingga orang pada umumnya mendefinisikan kekuasaan sebagai definisi kekuasaan sebagaimana A memiliki kuasa atas B, selama A bisa memberdayakan B untuk melakukan hal yang B sendiri tidak ingin melakukannya (Mintzberg, 1983). Disini kekuasaan memiliki maksud memaksa orang lain dan mutlak diikuti.

Kekuasaan sebagai pembangun ilmu politik (Abdullah, 2013), ada pula yang berpendapat sebagai hakikat ilmu politik itu sendiri (Apter, 1985), pada umumnya diartikan sebagai hal yang negatif, tidak banyak yang memandangnya secara positif (*positive thinking*). Konflik politik yang bersumber dari perebutan kekuasaan (*struggle of power*) (Blau, P.M., dan Scott, W. 2003), menjadi istilah yang tidak etis dan tabu untuk diperbincangkan. Gerakan kearah apolitik atau depolitisasi seperti ini juga membuat *term* kekuasaan menjadi negatif yang selalu dihindari. Pikiran negatif di atas sebenarnya bersandar pada pendapat aksi tahun 1955 yang sangat populer yaitu “*Power tends to corrupt and absolute power tends to corrupt absolutely*” (Isjwara, 1982).

Membahas mengenai kekuasaan tidak bisa dijauhkan dari fungsi penguasa itu sendiri (Stephen P. Robbins dan Timothy, 2015). Bila dalam lingkup Pendidikan, ada fungsi kepala sekolah selaku pemimpin dan penguasa di suatu Lembaga Pendidikan (Schein, 1983). Fungsi kepala sekolah selain sebagai manajer, juga sebagai tempat pemikir, pengembang, dan ujung tombak kemajuan sekolah (Zamroni, 2007). Kepala sekolah dituntut untuk progresif dan menguasai secara baik pekerjaannya melebihi rata-rata personil lain di sekolah, kepala sekolah diharuskan memiliki komitmen moral yang tinggi atas pekerjaannya sesuai dengan kode etik profesinya. Sebagai pemimpin, kepala sekolah merupakan subjek yang harus melakukan *upgrading* kemampuannya melalui bimbingan, tuntutan, pemberdayaan atau anjuran kepada seluruh komunitas sekolah untuk mencapai tujuan lembaga secara efektif dan efisien (Sirozi, 2004). Kepala sekolah tidak hanya mengelola sekolah dalam makna statis, melainkan menggerakkan semua potensi yang berhubungan langsung atau tidak langsung bagi kepentingan proses pembelajaran siswa (Solichin, 2015). Peran kepala sekolah dalam menciptakan kondisi *habit and culture* sekolah yang efektif dan efisien akan berdampak pada mutu prestasi dan masa depan peserta didik. Seperti yang akan dibahas dalam penelitian ini mengenai strategi politik kepemimpinan di sekolah menengah pertama. Hasil

observasi dengan beberapa tenaga pendidik dan kependidikan di Kota Salatiga, didapatkan informasi bahwa strategi politik yang diberlakukan oleh sekolah menengah pertama di Kota Salatiga sebaiknya dievaluasi untuk terwujudnya sekolah yang lebih baik lagi. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, penelitian dilakukan untuk mengetahui hasil evaluasi berupa kekurangan dan kelebihan strategi politik yang diberlakukan oleh kepala sekolah SMP. Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai dasar pengembangan mutu pendidikan dan kualitas manajemen sekolah tingkat menengah pertama.

## **2. METODE**

Metode penelitian yang digunakan adalah Penelitian ini adalah penelitian evaluasi yang dilaksanakan dengan menggunakan model *discrepancy*. Tujuan evaluasi program dengan model *discrepancy* adalah untuk membantu administrator mengambil sebuah keputusan untuk keberlangsungan program selanjutnya (Dimmitt, 2010, p.45). Penelitian evaluasi program dengan model *discrepancy* ini difokuskan pada tiga aspek yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program (Simanjuntak, 2005). Dalam penelitian evaluasi ini metode yang banyak digunakan adalah peninjauan (*review*) dokumen, dengar pendapat, dan wawancara mendalam (Sudarwan, D. 2000).

Penelitian evaluatif pada dasarnya terpusat pada rekomendasi akhir yang menegaskan bahwa suatu obyek evaluasi dapat dipertahankan, ditingkatkan, diperbaiki atau bahkan diberhentikan sejalan dengan data yang diperoleh (S. Arikunto, 2010). Dalam penelitian ini dilaksanakan untuk memperoleh data serta menghasilkan kesimpulan yang ada di lapangan (Sutama, 2019). Sehubungan dengan evaluasi strategi sebagai politik kepala sekolah di sekolah menengah pertama dengan sampel sekolah Muhammadiyah tingkat menengah pertama di Kota Salatiga.

## **3. HASIL DAN PEMBAHASAN**

Berdasarkan hasil wawancara dengan menggunakan pedoman wawancara di atas didapatkan bahwa pembuatan rancangan dan waktu pelaksanaan strategi politik Pendidikan berupa membangun jaringan, mengelola informasi, dan membangun koalisi oleh kepala SMP Muhammadiyah di Kota Salatiga sudah direncanakan dan tercantum dalam RKAS dan kepala sekolah mengoptimalkan RKAS dalam membangun jaringan, mengelola informasi, dan membangun koalisi di sekolah. Serta waktu pelaksanaan yang telah direncanakan dilakukan sesuai jadwal, apabila ada yang insidental maka yang terpenting yang menjadi prioritas dan didahulukan sesuai keperluan.

Pada proses pelaksanaan strategi politik oleh SMP Muhammadiyah di Kota Salatiga didapatkan bahwa metode yang digunakan kepala sekolah dalam menerapkan strategi politik berupa membangun jaringan, mengelola informasi, dan membangun koalisi di sekolah adalah proses mengamati, meniru dan memodifikasi (ATM), di mana kepala sekolah mengamati setiap

perkembangan sekolah-sekolah maju di Indonesia yang kemudian dicermati dan ditiru dengan memodifikasi program untuk kemajuan SMP Muhammadiyah di Kota Salatiga. Kepala sekolah juga memberikan bimbingan tentang bagaimana kepala sekolah membimbing tenaga pendidik tentang cara mempelajari strategi politik Pendidikan berupa membangun jaringan, mengelola informasi, dan membangun koalisi yang dilakukan oleh kepala SMP Muhammadiyah di Kota Salatiga dengan cara *briefing* atau koordinasi pagi yang dilakukan sebelum jam pembelajaran dimulai. Semua informasi terbaru selalu disosialisasikan kepada pendidik dan tenaga kependidikan saat koordinasi rutin pagi hari. Serta kepala sekolah memberi contoh kepada tenaga pendidik dan siswa dalam penerapan taktik politik berupa membangun jaringan, mengelola informasi, dan membangun koalisi oleh kepala SMP Muhammadiyah di Kota Salatiga. Bimbingan tersebut diberikan dalam beberapa bentuk, antara lain dengan adanya pelatihan rutin dan kegiatan motivasi untuk memberikan keteladanan dan contoh yang baik bagi para pendidik dan tenaga kependidikan.

Pada poin respon guru terhadap pelaksanaan strategi politik SMP Muhammadiyah di Kota Salatiga, didapatkan bahwa mengenai tanggapan tentang pelaksanaan taktik politik berupa membangun jaringan, mengelola informasi, dan membangun koalisi yang diberlakukan oleh kepala SMP Muhammadiyah di Kota Salatiga perlu dikembangkan lagi terutama pada strategi *marketing* perlu untuk keperluan membangun *branding* sekolah. Jika tanpa adanya relasi, kebutuhan untuk memasarkan sekolah yang bermutu akan menjadi berkurang. Mengenai pentingnya pelaksanaan taktik politik berupa membangun jaringan, mengelola informasi, dan membangun koalisi oleh kepala SMP Muhammadiyah di Kota Salatiga sangat penting, terlebih untuk sekolah swasta. Dengan taktik politik maka percepatan kemajuan sekolah akan terwujud.

Pada faktor penghambat dan pendukung jalannya strategi politik oleh kepala SMP Muhammadiyah di Kota Salatiga, didapatkan data bahwa membangun jaringan, mengelola informasi, dan membangun koalisi yang diberlakukan oleh kepala SMP Muhammadiyah di Kota Salatiga adalah komunikasi, terutama antar tim (sumber daya manusia) yang solid dan didukung dengan sarana prasarana sekolah yang memadai serta stake holder yang mendukung setiap program sekolah. Faktor penghambat yang ditemukan dalam penelitian ini yaitu keterbatasan waktu, terutama pada saat pandemi seperti ini yang mengharuskan semua pertemuan melalui video dan aplikasi yang memakan kuota internet lumayan banyak sehingga semakin banyak waktu yang diperlukan maka semakin banyak pula kuota yang dibutuhkan. Selain keterbatasan waktu, ada pula cuaca yang tidak menentu sehingga signal sulit didapatkan dan memengaruhi jaringan saat melakukan kegiatan secara virtual.

Pada poin evaluasi jalannya strategi politik oleh kepala SMP Muhammadiyah di Kota Salatiga, didapatkan bahwa metode evaluasi jalannya taktik politik berupa membangun jaringan, mengelola informasi, dan membangun koalisi oleh kepala SMP Muhammadiyah di Kota Salatiga



adalah metode langsung dan tak langsung. Metode langsung yaitu evaluasi yang dilakukan secara langsung sesaat setelah suatu acara selesai dilakukan, membahas mengenai kekurangan dan kendala selama jalannya acara. Metode tak langsung yaitu metode dengan menggunakan formulir atau angket tertulis yang disebar saat akhir tahun pembelajaran, berisi pertanyaan tentang keberhasilan program, kendala dan kekurangan selama satu periode dan dibahas dalam rapat kerja akhir tahun sebagai evaluasi besar. Setiap program pasti memiliki tingkat keberhasilannya masing-masing, setiap kegagalan program adalah suatu pembelajaran bersama untuk lebih baik. Peran kepala sekolah di sini adalah menyelaraskan, menyamakan persepsi dan muhasabah diri setiap tenaga pendidik dan kependidikan demi kemajuan sekolah di tahun ajaran berikutnya.

#### **4. PENUTUP**

Lembaga pendidikan (Sekolah atau Perguruan Tinggi), lembaga yang bersifat kompleks atau unik (Zainal, Veithzal Rivai, dkk. 2010). Bersifat Kompleks karena lembaga pendidikan sebagai sesuatu organisasi yang di dalamnya terdapat berbagai dimensi yang sama lain saling berkaitan dan saling menentukan. Sedangkan sifat unik, menunjukkan bahwa lembaga pendidikan sebagai organisasi memiliki ciri-ciri tertentu yang tidak dimiliki oleh organisasi-organisasi lain. Ciri-ciri yang menempatkan lembaga pendidikan memiliki karakter tersendiri, dimana terjadi proses belajar mengajar, tempat terselenggaranya pembudayaan kehidupan umat manusia, oleh karenanya di dalam lembaga pendidikan memerlukan tingkat koordinasi yang tinggi. Keberhasilan lembaga pendidikan adalah keberhasilan pimpinan lembaga pendidikan. Pimpinan lembaga pendidikan yang berhasil apabila mereka memahami keberadaan lembaganya sebagai organisasi yang kompleks dan unik, serta mampu melaksanakan peranannya sebagai seseorang yang diberi tanggungjawab untuk memimpin lembaganya (Yusup, M. (2018).

Efektivitas kepemimpinan sangat erat kaitannya dengan konsep kekuasaan (Pulungan, 2019). Seorang pemimpin bisa melakukan tugas kepemimpinannya jika dia memiliki kekuasaan (Sarnoto, 2012). Kekuasaan dapat memberikan implikasi positif maupun negatif terhadap kepemimpinan seseorang (Wandt, E. and B. G. W., 1957). Jika kekuasaan itu dipegang oleh mereka yang jujur, adil, dan bijaksana maka akan memberikan kebaikan dan manfaat bagi bawahannya. Namun jika sebaliknya, kekuasaan itu ada di tangan pemimpin yang korup, maka kepemimpinannya hanya akan membawa implikasi negatif atau mudarat kepada bawahan (Triwijayanto, 2009). Dalam kaitannya dengan kepemimpinan kepala sekolah, maka seorang kepala sekolah harus mampu menentukan jenis kuasanya berdasarkan kondisi yang dihadapi. dalam hal ini guru. Banyak kepala sekolah yang gagal menjalankan tugas-tugasnya hanya disebabkan oleh salah dalam menggunakan kekuasaannya (Irianto, 2012). Banyak guru yang sibuk dengan dirinya sendiri (Dasman, 2002). Apapun yang disampaikan oleh kepala sekolah senantiasa tidak mendapatkan respon yang baik (Cialdini, 2005). Celaknya lagi, ada guru yang sengaja menghindar berhadapan dengan kepala

sekolah lantaran tidak suka atau tidak sepaham dengan berbagai kebijakan yang diambil (Mathews, (1983).

Kepemimpinan kepala sekolah (Bolman, L.G., dan Deal, 2003), dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi strategi politik oleh kepala SMP Muhammadiyah di Kota Salatiga sudah terstruktur dalam RKAS atau rencana kegiatan dan anggaran sekolah. Setiap program sudah terencana dan terjadwal secara runtut yang sebelumnya sudah dibahas melalui rapat koordinasi kerja awal tahun ajaran bersama dengan jajaran pimpinan sekolah yang meliputi wakil kepala sekolah, kepala sekolah, komite, dan majelis dikedasmen pimpinan cabang Muhammadiyah. Setiap program pasti memiliki tingkat keberhasilannya masing-masing (Allison, 1971), setiap kegagalan program adalah suatu pembelajaran bersama untuk lebih baik (Hughes, Richard L., dkk. 2012). Peran kepala sekolah di sini adalah menyelaraskan (Mulyasa, 2013), menyamakan persepsi dan muhasabah diri setiap tenaga pendidik dan kependidikan demi kemajuan sekolah di tahun ajaran berikutnya (Munaisiroh, 2018).

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, A. (2013) . Pendidikan Islam Sepanjang Sejarah : Sebuah Kajian Politik Pendidikan di Indonesia. *Susurgalur: Jurnal Kajian Sejarah & Pendidikan Sejarah*.
- Allison, G. . (1971). *Essence of Decision: explaining the Cuban Missile Crisis*. Little Brown.
- Apter, D. . (1985). Introduction to Political Analysis. In *Introduction to Political Analysis* (Terjemahan). LP3ES.
- Arikunto, S. (2010). *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Rineka Cipta.
- Blau, P.M., dan Scott, W. . (2003). *Formal Organizations: A Comparative Approach*. Chadler.
- Bolman, L.G., dan Deal, T. . (2003). *Reframing Organizations: Artistry, Coice, and Leadership* (3rdeditio). Jossey-Bass.
- Cialdini R.B. (2005). *The Science of Influence*. Nj: Wiley.
- Daft, R. L, & S. R. M. (1986). *Organization A Micro/Macro Approach*. Forshman and Company.
- Dasman. (2002). *KEKUASAAN DI SEKOLAH: Tingkat Penggunaan Basis Kekuasaan Posisi (Position Power) Dasman Lanin. 29–37. Oleh: Dunn, W. (1994). Public Policy Analysis. In an Introduction. Prentice-Hall International, Inc., Englewood Cliffs.*
- French, J.R.P., dan Raven, B. . (1968). *Bases of Social Power*. Harper&Row.
- G.A. Almond & J.S Coleman, (ed). (1960). *The Politics of The Developing*. Princeton University press.
- Gibson, I. & D. (1977). Organization (5th edition). In *Organisasi (edisi kelima) Terjemahan Agus Dharma* (Terjemahan). Erlangga.
- Greenleaf, R. K. (1982). *Servent Leadership a Journey into the nature uo legitimate power and greatness* (terjemahan). Publist Press.
- Hoe, W. K. and C. G. M. (2014). *Educational Administration: Teory, Research and practice* (D. Dan R. K. Pancasari (ed.); Terjemahan). Pustaka Belajar.
- Hughes, Richard L., dkk. (2012). *Leadership Memperkaya Pelajaran dan Pengalaman* (P. I. Izzati(ed.); Edisi VII,). Salemba Humanika.

- Irianto, Y. B. (2012). *Kebijakan Pembaharuan Pendidikan: Konsep, Teori dan Model*. PT. RajawaliGrafindo Persada.
- Isjwara, F. J. (1982). *Pengantar Ilmu Politik*. Bina Cipta.
- Mathews, J. B. (1983). *The Effective use of management consultants in higher education*. NationalCenter for Higher Educational Management System, Inc.
- Mintzberg, H. (1983). *Power in and around organizations*. Prentice Hall, Inc.
- Miskel, W. K. H. dan C. G. (2014). *Educational Administration: Teory, Research and practice* (D. Dan R. K. Pancasari (ed.); Terjemahan). Pustaka Pelajar.
- Moestopo. (1973). *he Acceleration and Modernization of 25 Year Development*. CSIS.Mulyasa. (2013). *Manajemen Dan Kepemimpinan Kepala Sekolah*. Bumi Aksara.
- Munaisiroh, S. C. (2018). *Filosofi Evaluasi Pendidikan*. Blogspot.Com.
- Pfeffer, J. (2010). *Power: Why Some people have it and Others Don't*. HarperCollins.
- Pulungan, H. R. (2019). Wacana Politik Pendidikan Dalam Perkembangan Demokrasi Di Indonesia. *Forum Paedagogik*, 11(01), 77–88.
- Sarnoto, A. Z. (2012). Konsepsi politik pendidikan di Indonesia. *EDUCHILD: Jurnal Pendidikan Sosial Dan Budaya*.
- Schein, E. H. (1983). *Organizational Psychology* (Nurul Iman (ed.); Terjemahan). LPPM.
- Simanjuntak. (2005). *Manajemen Dan Evaluasi Kinerja*. Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Sirozi, M. (2004). *Politik Kebijakan Pendidikan di Indonesia Peran Tokoh-tokoh Islam dalam Penyusunan UU No.2 Tahun 1989*. INIS.
- Solichin, M. (2015). IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENDIDIKAN DAN PERAN BIROKRASI. *Religi: Jurnal Studi Islam*, 6 no. 2(Impemetasi Kebijakan). <https://doi.org/1978-306X>; 148-178
- Stephen P. Robbins dan Timothy A. (2015). *Perilaku Organisasi (Organizational Behaviour)* (R. S. dan F. Sirait (ed.); terjemahan). Salemba Empat.
- Sudarwan, D. (2000). *Menjadi Peneliti Kualitatif*. Pustaka Setia.
- Suparlan, & Sutama. (2020). Arah Politik Pendidikan Islam Di Masa Disrupsi. *Paedagoria : Jurnal Kajian, Penelitian Dan Pengembangan Kependidikan*, 11(3), 257–272. <http://journal.ummat.ac.id/index.php/paedagoria> Prefix
- Sutama. (2019). *Metode Penelitian Pendidikan*. CV. Jasmine.
- Triwijayanto, T. (2009). *Kata Kunci: monitoring, evaluasi, pelaporan, penilaian kinerja, manajerial kepala sekolah*. 67–77.
- Wandt, E. and B. G. W. (1957). *Essentials of Educational Evaluation*. Holt Rinehart and Winston.
- Yusup, M. (2018). Tanggung Jawab dan Otoritas Kepemimpinan Pendidikan Dalam Islam. *Idarah(Jurnal Pendidikan Dan Kependidikan)*, 2(1), 62–79. <https://doi.org/10.47766/idadrah.v2i1.266>
- Zainal, Veithzal Rivai, dkk. (2010). *Kepemimpinan dan Perilaku Organisasi* (Edisi IV). PT GrafindoPersada.
- Zald, M.M., and Berger, M. A. (1978). Social Movement in Organizations: *American Journal*

*of Sociology.*

Zamroni. (2007). *Pendidikan dan Demokrasi dalam Transisi (Prakondisi Menuju Era Globalisasi)*. PSAP Muhammadiyah.